

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA PANTAI TANJUNG BELANDANG  
DI KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN PASAL 24  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG KEPARIWISATAAN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah**

**1. Pengertian Peran**

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>17</sup>

Pemerintahan Daerah mempunyai peranan yang harus di jalankan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : “pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” Berdasarkan hubungan tersebut pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan

---

<sup>17</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>18</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

## 2. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>19</sup> S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2022 Pukul 23.13 WIB.

- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

### 3. Pengertian Pemerintah

Secara etimologi, kata pemerintah berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- 1) awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan.
- 2) akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.<sup>20</sup>

Menurut Ermayana Suradinata sebagaimana dikutip oleh Zaidan Nawawi dalam bukunya berjudul manajemen Pemerintah mengatakan bahwa pemerintah adalah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau penguasa suatu Negara.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan, peran pemerintah adalah suatu perilaku yang diinginkan oleh masyarakat untuk menciptakan segala perhatian dalam

---

<sup>20</sup> Abidarin Rosidi dan Anggraeni Fajriani, *Reinventing Government: Demokrasi Dan Reformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, Hlm. 5.

<sup>21</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 19.

<sup>22</sup> Ibid

urusan baik dalam keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan keamanan kehidupan sosial.

Pemerintah juga merupakan satu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan proses kegiatannya disebut pemerintahan dan besar kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, dengan demikian pemerintah dalam menjalankan proses kegiatan Negara harus berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu negara.

Bisnis pariwisata dianggap lahir oleh pemerintah pada tahun 1962 ketika Hotel Indonesia diresmikan dan hukum tentang kepariwisataan baru tersusun 28 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Undang-Undang tersebut Pada dasarnya bertujuan seperti diatur alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang secara tegas menyatakan tujuan terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keistimewaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 salah satunya adalah adanya kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Ketentuan seperti ini tidak ada dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Keistimewaan yang lain yaitu dengan Dimasukkannya unsur penting yang kini tengah menjadi isu dunia pada Umumnya. Hal tersebut terkait kepariwisataan yang merupakan bagian

Pembangunan nasional yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan Berkelanjutan. Ada suatu prinsip penting tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh UU No.10 Thn.2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata**

### **1. Pengertian Pariwisata**

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>24</sup>

Freuler dalam Pendit merumuskan pengertian pariwisata dalam arti modern yaitu pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian

---

<sup>23</sup> Lenni Hasni Mulyani.(2015). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Peningkatan Wisatawan Domestik Di Kota Makassar. Makassar, Hlm. 30

<sup>24</sup> Oka A, Yoeti. 2001. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Penerbit Paramita Pradnya. Jakarta. Hlm. 43

yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan.<sup>25</sup>

Menurut Marpaung dan Bahar dalam Sihite pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk, sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>26</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>25</sup> Pendit, Nyoman S. 2002. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta:PT. Pradnya Paramita. Hlm. 34

<sup>26</sup> Marpaung, Happy dan Herman Bahar. (2000). Pengantar Pariwisata. Bandung : Penerbit Alfabeta. Hlm. 46

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.<sup>27</sup>

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

---

<sup>27</sup> Ibid

Sektor Pariwisata secara luas adalah kegiatan rekreasi diluar domisili melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari susasana lain. Pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat negara maju dan sebagian keeii masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manuasia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 4 menyatakan bahwa Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Wahab memberikan ringkasan mengenai manfaat pariwisata bagi , suatu negara yang dapat dijabarkan sebagai faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat dan cita rasa yang beraneka ragam.<sup>28</sup> Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional misalnya:

---

<sup>28</sup> Wahab, Salah. 2003. Manajemen kepariwisataan. Jakarta : Pradnya Paramita

- a. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan pembangunan dan pembaharuan fasilitas wisata. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan prasarana dan suprasarana pariwisata.
- b. Menggugah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata misalnya: usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain), yang memerlukan perluasan beberapa industri seperti misalnya: peralatan hotel dan kerajinan tangan.
- c. Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian.
- d. Memperluas pasar barang-barang lokal.
- e. Menunjang pendapatan negara dengan valuta asing sehingga mengurangi devisa dalam neraca pembayaran dan memajukan perekonomian nasional.
- f. Memberi dampak positif pada tenaga kerja di negara, karena pariwisata memperluas lapangan kerja baru (tugas baru) di hotel atau di tempat penginapan lainnya, usaha perjalanan, di kantor-kantor pemerintah yang mengurus pariwisata-pariwisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cendera mata, serta tempat-tempat penjualan lainnya.

## 2. Pengertian Ekonomi

Pengertian ekonomi menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang maupun jasa).

### a. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi Dalam pada itu, hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah pen-

jabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek berikut.

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya dalam usaha pembangunan ekonomi tersebut.

Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

1. Hukum Ekonomi Pembangunan  
Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi peng aturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan
2. Hukum Ekonomi Sosial  
Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Selain itu, Rochmat Soemitro memberikan definisi hukum ekonomi. Menurutnya, hukum ekonomi ialah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Namun, ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.

Sunaryati Hartono berpendapat dan menyatakan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam pelbagai

peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>29</sup>

### 3. Potensi Pariwisata

Pendit menerangkan bahwa potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata. Dengan kata lain, potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (*tourist attraction*) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan baik yang berasal dari lingkungan alam yang dapat mendukung peri kehidupan manusia maupun suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi pariwisata merupakan suatu kemampuan dari objek wisata yang berasal dari alam seperti keindahan alam, iklim, pantai, pegunungan, goa dan sebagainya maupun hasil budi daya manusia seperti candi, monumen, peninggalan purbakala, kesenian dan sebagainya yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung kemajuan kepariwisataan disuatu tempat atau daerah tertentu.<sup>30</sup>

Potensi pariwisata yang dikembangkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.

---

<sup>29</sup> Elsi Kartika sari dan Advendi simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta edisi kedua 2017, Hlm 4-5.

<sup>30</sup> Ibid., Hlm 27

Potensi pariwisata yang juga disebut dengan modal kepariwisataan atau sumber daya wisata, pengembangannya sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan manusia. Sumber daya wisata dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia menjadi suatu objek wisata yang dapat memenuhi keinginan wisatawan, sumber daya potensial (unsur-unsur lingkungan yang akan menjadi sumber daya aktual) maupun fasilitas buatan manusia. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan wisatawan untuk mengunjungi, melakukan aktivitas dan kembali ke tempat asalnya sehingga mereka mendapatkan kepuasan dari kegiatan wisata yang telah mereka lakukan.

Karyono mengemukakan bahwa agar suatu daerah tujuan Wisata mempunyai daya tarik maka harus mempunyai 3 syarat daya tarik yaitu: ada sesuatu yang bisa dilihat (*something to see*), ada sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*) dan ada sesuatu yang bisa dibeli (*something to buy*)<sup>31</sup>.

#### **4. Macam Potensi Pariwisata**

Soekadijo menyatakan bahwa “Modal atau potensi pariwisata dapat berupa alam, kebudayaan dan manusia itu sendiri”. Lebih lanjut mengenai potensi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) Potensi alam  
Yang dimaksud dengan potensi alam adalah alam fisik, fauna dan floranya. Suatu daerah yang memiliki potensi alam ini akan menjadi

---

<sup>31</sup> A. Hari Karyono. 1997. Kepariwisataan. Jakarta: Grasindo, Hlm 28

<sup>32</sup> R.G Soekadijo. (1997). Anatomi Parawisata. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 51

- daya tarik tersendiri untuk dikunjungi,
- b) Potensi kebudayaan  
Yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian tetapi juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup di tengah-tengah suatu masyarakat.
  - c) Potensi manusia  
Manusia dapat menjadi atraksi wisata yang dapat menarik kedatangan Wisatawan. Wisatawan dapat tertarik untuk mengunjungi suatu daerah karena sikap ramah tamah dari masyarakat setempat.

## 5. Pengembangan Pariwisata

Menurut Poerwadarminta pengembangan merupakan perbuatan (hal,cara,usaha) mengembangkan. Fandeli mengemukakan Pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada:

- a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budayadan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan wirausaha skala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berpotensi pada teknologi komparatif.
- d. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Yoeti menjelaskan tentang pengertian pengembangan pariwisata dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu pengembangan produk baru dan pengembangan atraksi wisata yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pengembangan produk baru  
Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan

---

<sup>33</sup> Oka A, Yoeti. 2001. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Penerbit Paramita Pradnya. Jakarta. Hlm. 20

ataupun yang akan dipasarkan. Pengembangan produk baru meliputi perbaikan pelayanan (*service*) semenjak seorang wisatawan meninggalkan tempat kediamannya sampai ke tempat atau objek yang dituju sampai kembali ke tempat asalnya.

b. Pengembangan atraksi wisata

Atraksi wisata adalah peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara periodik, baik yang bersifat tradisional maupun dilembagakan dalam kehidupan masyarakat modern, mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk menyaksikan atau menghadirinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menggali, memperbaiki dan memajukan potensi yang ada di suatu daerah. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi pendapatan secara merata.

## 6. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting. Bahkan sektor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Sehingga pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia. Tujuannya adalah agar lebih banyak wisatawan datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya selama berkunjung ke Indonesia.

Pada dasarnya tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi. Pengembangan kepariwisataan nasional, dengan tujuan untuk memperlancar usaha kepariwisataan nasional sebagai

salah satu sumber penghasil devisa negara perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja badan pelaksana dibidang kepariwisataan tingkat pusat.

## **7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata**

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan objek wisata perlu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan pengembangan objek wisata. Faktor-faktor tersebut merupakan unsur yang menentukan pengembangan objek wisata. Pendit pelaksanaan pengembangan pariwisata di Indonesia mendasarkan pada konsep perwilayahan, Hal ini mengingat bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri dari banyak pulau dan beraneka ragam objek bermutu tinggi yang tersebar di berbagai tempat, baik yang merupakan atraksi tidak bergerak seperti keindahan alam, monumen, candi dan sebagainya maupun atraksi bergerak yang sangat tergantung pada upaya manusia dalam mengembangkannya seperti kesenian, adat istiadat, seremoni, perayaan, pekan raya dan sebagainya.<sup>34</sup>

Perwilayahan dalam dunia kepariwisataan adalah pembagian wilayah-wilayah pariwisata yang dapat dipandang memiliki potensi, yang selanjutnya dapat dijadikan tujuan yang pasti. Dalam pengertian ilmiahnya wilayah ini disebut daerah tujuan wisata (*tourist destination area*), yang memiliki batasan-batasan sebagaimana dijelaskan oleh Pendit yaitu yang dimaksud dengan wilayah pariwisata adalah tempat atau daerah yang karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalu lintas dan fasilitas-fasilitas

---

<sup>34</sup> Pendit, Nyoman S. 2002. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta:PT. Pradnya Paramita. Hlm. 22

kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan.

Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa ada tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata yaitu :

- a. Memiliki atraksi atau objek yang menarik
- b. Mudah dicapai dengan alat-alat kendaraan
- c. Menyediakan tempat untuk tinggal sementara

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan guna memperoleh hasil yang optimal hendaknya memperhatikan faktor-faktor penentu pengembangan suatu daerah tujuan wisata yaitu.

- 1) Tersedianya objek wisata atau atraksi yang dapat dinikmati atau disaksikan, baik yang berasal dari alam maupun hasil budi daya manusia.
- 2) Tersedianya sarana transportasi dan perhubungan.
- 3) Tersedianya komponen penunjang yang berupa akomodasi dan infrastruktur Adanya atraksi wisata yang menarik merupakan faktor utama dalam

pengembangan pariwisata. Akan tetapi pengembangan tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung suatu daerah tujuan wisata.

Sarana kepariwisataan menurut Karyono adalah Perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan. Dalam hal prasarana yang harus tersedia dikawasan wisata, Wahab sebagaimana yang dikutip oleh Karyono membagi prasarana menjadi tiga kelompok yaitu prasarana umum,

kebutuhan pokok pola hidup modern dan prasarana wisata.<sup>35</sup>

- 1) Prasarana umum, meliputi: Sistem penyediaan air bersih, Kelistrikan, Jalur- jalur lalu lintas, Sistem pembangunan limbah, Sistem telekomunikasi.
- 2) Kebutuhan pokok pola hidup modern Misalnya rumah sakit, apotek, bank, pusat-pusat perbelanjaan, salon, kantor-kantor pemerintahan dan pompa- pompa bensin.
- 3) Prasarana wisata, Prasarana yang diperuntukkan bagi wisatawan yang meliputi tempat penginapan, tempat dan kantor informasi, tempat promosi, tempat- tempat rekreasi dan sport.

Pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui usaha pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

Sehubungan dengan pembangunan pariwisata perlu adanya perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pariwisata hendaknya mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dan kebutuhan wisatawan, sehingga wisatawan akan merasa nyaman dan senang berkunjung ke suatu objek wisata.

---

<sup>35</sup> A. Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: Grasindo, Hlm 74